

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan data yang diperoleh, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Bahwa peran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dalam tata kelola keuangan yang baik sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) yang melaksanakan tugas perbendaharaan negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. KPPN Pekalongan mengelola keuangan negara dilakukan melalui 3 tahap, yaitu:
 - a. Perencanaan anggaran, diawali dengan satuan kerja (satker) pada kementerian/lembaga menjabarkan pagu anggaran dan pagu alokasi anggaran yang telah ditetapkan kementerian keuangan dan bappenas dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Data tersebut yang sudah disetujui oleh unit eselon I untuk menyusun anggaran selanjutnya direktorat jenderal anggaran (DJA) menelaah data yang telah disetujui kemudian dicetak menjadi himpunan dan lampiran nota keuangan yang kemudian disampaikan ke DPR bersama RUU APBN untuk dilakukan pembahasan dan ditetapkan menjadi UU APBN.

b. Pelaksanaan anggaran, pelaksanaan yang diikuti dengan proses pencairan dana dari masing-masing kementerian di dirjen keuangan untuk kegiatan pemerintahan.

Mekanisme pelaksanaan : KPPN melakukan validasi, review dan persetujuan terhadap resume tagihan sebagai dasar pengajuan surat permintaan pembayaran.

Setelah KPPN melaksanakan review dan verifikasi terhadap SPM, kemudian menyetujui SPM dengan menerbitkan surat persetujuan tagihan (SPPT).

c. Pertanggung jawaban, Satker menyusun laporan keuangan bulanan yang kemudian dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN. Satker akan menyampaikan laporan keuangan hasil rekonsiliasi ke tingkat kanwil, kantor pusat eselon 1 dan biro keuangan kementerian/lembaga melalui SAKTI.

A. Saran

1. Dengan melihat peran KPPN yang begitu strategis dalam pengelolaan keuangan negara di Republik Indonesia, dengan ini penulis menyarankan agar pelayanan terhadap mitra kerja yang sudah baik selama ini tetap dipertahankan dan supaya ditingkatkan kualitasnya. Karena dengan pelayanan yang memuaskan, pihak mitra kerja dapat melaksanakan pencairan dananya di KPPN dengan cepat yang akan berakibat proses pembangunan nasional dapat lancar pendanaannya.

2. KPPN agar mengantisipasi terhadap peraturan perkembangan ekonomi global yang mempengaruhi kebijakan APBN negara. Dengan menerbitkan Surat edaran atau petunjuk pelaksanaan pembayaran kepada mitra kerja dengan cepat dan mudah.